

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kondisi kependudukan di Indonesia saat ini baik yang menyangkut jumlah, kualitas, maupun persebarannya merupakan tantangan yang berat yang harus diatasi bagi tercapainya keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia. Situasi dan kondisi kependudukan yang ada pada saat ini merupakan suatu fenomena yang memerlukan perhatian penanganan secara saksama, lebih sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang telah dijalankan selama ini dilakukan melalui program pengaturan kelahiran atau program keluarga berkualitas (KB). Selain melalui pengaturan kelahiran, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk juga harus didukung dengan adanya penyerasian kebijakan pengendalian penduduk dengan kebijakan pembangunan bidang lainnya terutama yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas, maupun mobilitas penduduk agar selaras, serasi, dan sinergis.

Penduduk dapat menjadi aset yang bermanfaat bagi pembangunan, salah satunya adalah kualitas penduduk, namun dipihak lain penduduk akan menjadi beban yang berat jika memiliki kualitas yang rendah. Kependudukan merupakan faktor dominan yang harus diperhatikan dalam perkembangan pembangunan.

Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan bagian dari pembangunan prioritas nasional dan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ditandai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas. Pembangunan program Bangga Kencana ini diarahkan dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui 3 fokus prioritas, yaitu revitalisasi program keluarga berencana, penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, dan peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu. Namun dalam pelaksanaannya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa mendapatkan amanah untuk melaksanakan revitalisasi KB dan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa "Keluarga Berencana Adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal

melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Berdasarkan kondisi di atas maka keberhasilan pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Minahasa akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan Daerah.

Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang terjangkau, bermutu efektif menuju terbentuknya keluarga berkualitas. Disamping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung daya tampung harus menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2023 ini dimaksudkan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa sebagai implementasi dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan rencana pembangunan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa secara berkelanjutan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MINAHASA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Dinas serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Minahasa.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
7. Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. Pelaksanaan pelayanan KB;
9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga;
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
11. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan; dan
12. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Kepala Dinas mempunyai tugas:

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program Dinas, pelaksanaan program mengacu pada program Nasional dan Daerah;
3. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan tata laksana pelayanan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, kegiatan masing-masing bidang, kegiatan UPT, kegiatan kelompok jabatan fungsional dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;

7. Mengarahkan penyelenggaraan bimbingan teknis, penyuluhan dan supervisi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
8. Melaksanakan pemantauan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
9. Mengendalikan urusan administrasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Menyampaikan laporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Melaksanakan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
3. Penyusunan rencana program dan anggaran;
4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;

5. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
6. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
7. Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan;
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(1) Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Menata naskah dinas, agenda, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian, serta pengarsipan dan dokumentasi;
2. Mengurus kebersihan, keamanan, ketertiban dan pemeliharaan gedung kantor;
3. Menyiapkan administrasi Perjalanan Dinas Pegawai dan keprotokolan;
4. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga baik barang bergerak dan tidak bergerak di lingkungan Dinas;
5. Mencatat, menyimpan, mengelola/memelihara dan mendistribusikan barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah di lingkungan Dinas, serta menyiapkan bahan usulan penghapusan barang milik daerah yang ada di lingkungan Dinas;
6. Melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
7. Membuat Daftar Nominatif Pegawai di Lingkungan Dinas;
8. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
9. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Badan;
10. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai analisis jabatan, analisis beban kerja dan volume kerja di lingkungan Dinas; dan
11. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub bagian keuangan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;

2. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
3. Menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
4. Melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
5. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;
6. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam rangka penyusunan rencana anggaran;
7. Melakukan kegiatan pengelolaan keuangan mengenai intensifikasi penerimaan, efisiensi dan efektifitas pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan;
8. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keuangan;
9. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
10. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan pelaporan;
11. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan koordinasi rencana program dan anggaran Subbagian Perencanaan;
3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana Subbagian Perencanaan;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis.
5. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
6. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja;
7. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan;
8. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Subbagian Perencanaan sesuai tugas dan kewenangannya;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Sub bagian Perencanaan;
10. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub bagian Perencanaan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah di bidang pendampingan,

pemberdayaan masyarakat, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
3. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Sub Koordinator Advokasi dan KIE mempunyai tugas:

1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan di bidang advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;
2. Menyiapkan bahan pembimbingan, penyuluhan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang advokasi dan KIE dan Penggerakan;
3. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang advokasi dan KIE;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi dibidang advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Koordinator Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP:

1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan di bidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
2. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
3. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi dibidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
5. Melaksanakan pembinaan lini lapangan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah dan daerah serta kebijakan teknis dibidang keluarga berencana; Dalam melaksanakan tugas Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-KB;
5. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana KB;
6. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
9. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Sub Koordinator pengendalian dan pendistribusian Alat kontrasepsi;

1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan di bidang pengendalian dan pendistribusian Alokon;
2. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan di bidang pengendalian dan pendistribusian Alokon;
3. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alokon;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alokon.

(2) Sub Koordinator Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan jaminan pelayanan KB;
2. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan jaminan pelayanan KB;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(3) Sub Koordinator pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB mempunyai tugas:

1. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
2. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;

3. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan KB;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah dan daerah serta kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga balita (BKB);
4. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan remaja (BKR);
5. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan (BKL/R);
6. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
7. Pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
9. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Sub Koordinator pemberdayaan kesejahteraan keluarga mempunyai tugas:

1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dibidang kesejahteraan keluarga;
2. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan dibidang kesejahteraan keluarga;
3. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang kesejahteraan keluarga;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan kesejahteraan keluarga;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Sub Koordinator bina ketahanan keluarga mempunyai tugas:
1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dibidang ketahanan keluarga;
 2. Melakukan bahan pembimbingan dibidang ketahanan keluarga;
 3. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang ketahanan keluarga;
 4. Pengkoordinasian penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
2. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
3. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
4. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
5. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
6. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
7. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
8. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (1) Sub Koordinator pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk mempunyai tugas:

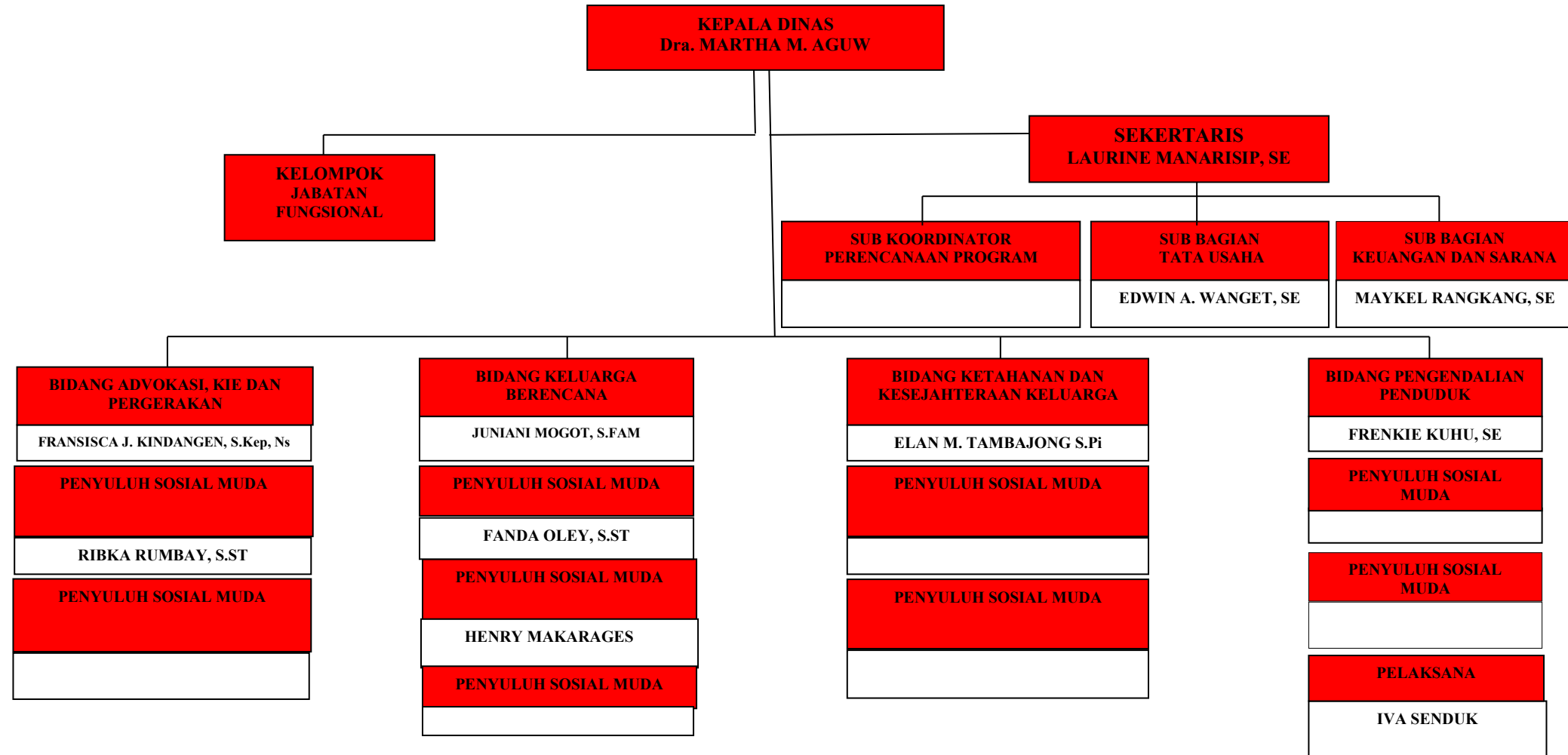
1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
2. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;

3. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk; dan
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Koordinator data dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk mempunyai tugas:
1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan data dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 2. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan data dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 3. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan data dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; dan
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MINAHASA**



Kondisi kepegawaian menurut Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah PNS menurut Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa.

No	Golongan/Ruang	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	D-IV	D-III	D-1	SLTA	
1	IV/c		1					1
2	IV/b		1					1
3	IV/a							
Jumlah Gol. IV								
4	III/d	1	5					6
5	III/c		1					1
6	III/b		1					1
7	III/a		1					1
Jumlah Gol. III								
8	II/c						1	1
Jumlah Gol II								
TOTAL		1	10				1	12

Tabel 2. Jumlah PLKB di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa.

No	Kecamatan	Golongan/Ruang								Total
		II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	
1.	Eris									1
2.	Remboken									1
3.	Lembean Timur									1
4.	Kombi									1
5.	Kakas								1	2
6.	Kakas Barat									1
7.	Langowan Barat									1
8.	Langowan Timur									1
9.	Langowan Selatan									1
10.	Langowan Utara							1		2
11.	Kawangkoan						1			2
12.	Kawangkoan Utara								1	2
13.	Kawangkoan Barat									1
14.	Tompaso									1
15.	Tompaso Barat									1
16.	Sonder									1
17.	Tombariri									1
18.	Tombariri Timur									1
19.	Pineleng									1
20.	Mandolang									1
21.	Tombulu									1
22.	Tondano Barat									1
23.	Tondano Timur									1
24.	Tondano Utara								1	2
25.	Tondano Selatan						1			2

Jumlah						2	1	3	31
--------	--	--	--	--	--	---	---	---	----

C. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa
- C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran Strategis
- C. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Rencana Kerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Evaluasi Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini disusun berdasarkan pencapaian program dalam strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa. Melalui visi dan misi yang akan dicapai selama lima tahun, maka dibuat rencana kerja tahunan sebagai implementasi pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan menggambarkan sejauh mana rencana kerja tahun 2023 dapat dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

1. VISI

Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera

2. MISI

- 1) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing
- 2) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan mendorong Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata.
- 3) Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
- 4) Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan
- 5) Memantapkan Manajemen Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Untuk pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Minahasa, Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Berpedoman pada Misi 1(Satu) dan Misi 5(Lima), Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana jangka menengah Kabupaten Minahasa, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja

pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Minahasa secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas

Sasaran : 1.1 Mengendalikan pertumbuhan penduduk

1.2 Meningkatkan pembinaan keluarga berencana

1.3 Meningkatkan pemberdayaan keluarga sejahtera

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran: 2.1 Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah

C. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tabel 3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis

Indikator kinerja utama

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,2
	1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,09
	2. Meningkatkan pembinaan keluarga berencana	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	81,14%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,75%
3. Meningkatkan Pemberdayaan keluarga sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80%	

Indikator kinerja kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan)	1 Dokumen
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	28 org
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	5
2	Meningkatkan advokasi, komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) serta kualitas tenaga penyuluh lapangan	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	37%
3	Meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana yang merata dan berkualitas	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	31,5%
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	77,61%
		Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	29,49%
		Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	34,62%
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	41,68%
4	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	88%

		Median Usia kawin pertama(MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	21
--	--	---	----

D. RENCANA KERJA TAHUN 2023

Rencana kinerja menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2023, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2023 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Rencana Kerja Tahun 2023

Kode					Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja
2	14	02			Program pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	2,09
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan provinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan	1 Dokumen
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	28
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	1 Dokumen

2	14	03			Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	81,14%
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,75%
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	1 Dokumen
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rajorcem), rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (Rajorcem), rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini lokakarya (Minilok)	25 Laporan
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana)	25 Laporan
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	37%
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	25 Unit
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1470 Orang
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	31,5%

2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	12 Laporan
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1212 Orang
2	14	03	2.03	06	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	3 Unit
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pel.KB dan kespro di faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	1 Laporan
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	5
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) di kampung KB	45 Kampung KB
2	14	04			Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80%
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	88%
2	14	04	2.01	02	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	10 Unit

2	14	04	2.01	05	Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksanaan (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	810 Kader
2	14	01			Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/disahkan dan didistribusikan	100%
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 Orang
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	98%
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat operasionalisasi perkantoran tahunan	98%
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi	91%
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa adalah menggunakan Indikator, Target. Capaian Program Kegiatan.

Indikator untuk Capaian Program adalah perwujudan pencapaian dari pelaksanaan program kegiatan, Sedangkan indikator atau pengukuran untuk Keluaran adalah produk yang dihasilkan sebagai keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Sementara untuk pengukuran Hasil yaitu penggunaan dari produk keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.1 Hasil Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Minahasa Tahun 2023

Indikator kinerja utama

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target	capaian	Permasalahan	Ket
	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,2	0,47	Laju pertumbuhan penduduk rendah, sebaiknya LPP 1 untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	
1	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,09	2,02	-	
2	Meningkatkan pembinaan keluarga berencana	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	81,14%	59,18%	Tidak semua faskes melakukan pelaporan di new siga	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,75%	30,45%	Adanya PUS yang takut menggunakan KB, merasa tidak cocok dan juga karena faktor adat budaya	

3	Meningkatkan pemberdayaan keluarga sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80%	65%	Terdapat/adanya Kelompok kegiatan yang tidak melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga karena kurangnya referensi tentang 8 fungsi keluarga	
					Kurangnya pendampingan dari Petugas Lapangan	

Indikator kinerja kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	capaian	Permasalahan	Ket
1	Meningkatkan pembangunan berwawasan kependudukan	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan	1 Dokumen	-	Dokumen GDPK 2023 selesai dibuat, rencana diperdakan tahun 2023	
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	28 org	2,9	-	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	5	5	-	
2	Meningkatkan advokasi, komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) serta kualitas tenaga penyuluh lapangan	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	5	-	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	37%	2,15%	Jumlah PLKB yang masih kurang tidak sebanding dengan luas wilayah Kab. Minahasa	

3	Meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana yang merata dan berkualitas	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	31,5%	54,86%	-	
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	77,61%	79,4%	-	
		Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	29,49%	0,22%	Tidak semua faskes melakukan pelaporan di new siga	
		Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	34,62%	20%	-	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	41,68%	12,08	kurangnya peserta KB Penerima bantuan iuran (PBI)	
4	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	88%	83%	Masih ada anggota poktan dan UPPKA yang masih status PUS tetapi tidak ber KB	
		Median Usia kawin pertama(MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	21	21,7	-	

B. EVALUASI KINERJA

Pengukuran capaian kinerja hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan dalam APBD yang merupakan bagian belanja operasional dan belanja pemeliharaan serta belanja modal, sedangkan khusus untuk komponen belanja administrasi umum tidak dapat diukur secara kuantitatif capaian kinerja yang dihasilkan.

Tabel 3.2 Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Tahun 2023

Kode					Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja	Realisasi
2	1	0			Program pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	2,08	2,02
2	1	0	2.0		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan provinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan)	1 Dokumen	0
2	1	0	2.0	0	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
2	1	0	2.0		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	28	2,9

2	1	0	2.0	1	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen
2	1	0			Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	80,74%	59,18%
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	16%	30,45%
2	1	0	2.0		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi masyarakat) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	5
2	1	0	2.0	0	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	1 Dokumen	1 Dokumen
2	1	0	2.0	0	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rajorcam), rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (Rajorcam), rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini lokakarya (Minilok)	25 Laporan	25 Laporan

2	1	0	2.0	0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di balaipenyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balaipenyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana)	20 Laporan	25 Laporan
2	1	0	2.0		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase masyarakat yang terpapar/icipan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	37%	2,15%
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	25 Unit	25 Unit
2	1	0	2.0	0	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikutipenggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1470 Orang	1470 Orang
2	1	0	2.0		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	31,5%	54,86%
2	1	0	2.0	0	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan
2	1	0	2.0	0	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikutikesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1212 Orang	1113 Orang

2	1	0	2.0	0	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	3 Unit	3 Unit
2	1	0	2.0	0	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pel. KB dan kespro di faskestermasuk jaringan dan jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan
2	1	0	2.0		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPk yang efektif	5	5
2	1	0	2.0	0	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPk di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) di kampung KB	45 Kampung KB	45 Kampung KB
2	1	0			Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80%	65%
2	1	0	2.0		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	88%	83%
2	1	0	2.0	0	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	10 Unit	10 Unit

2	1	0	2.0	0	Penyediaanbiayaoperasioanalbagipengelola dan pelaksanaan (kader) ketahanan dan kesejahteraankeluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan pemberdayaanekonomikeluarga/UPPKS)	Jumlahkaderpengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraankeluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaanekonomikeluarga/UPPKS)	810 Kader	810 Kader
2	1	0			Program penunjangurusanpemerintahandaerah	Nilai IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)	4	4
2	1	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasepelaksanaankeuangan yang ditetapkan/disahkan dan didistribusikan	100%	100%
2	1	0	2.0	0	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerimagaji dan tunjangan ASN	16 Orang	16 Orang
2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentaselayananumumperanghkat daerah yang terfasilitasi	98%	98%
2	1	0	2.0	0	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket
2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	Persentaseingkatoperasionalisasipe rkantorantahunan	98%	98%
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan

2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi	91%	90%
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2021 sebesar :

Rp 9.093.304.500

Tabel 3.3. Target, Realisasi dan Prosentase Pencapaian Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2023

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI	
			Anggaran	%
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Rp 1.085.227.000	Rp 1.012.816.278	93
2	Tunjangan Keluarga	Rp 103.917.000	Rp 95.888.226	92
3	Tunjangan Struktural	Rp 294.472.750	Rp 168.435.000	57
4	Tunjangan Fungsional Umum	Rp 6.814.000	Rp 6.010.000	88
5	Tunjangan Beras	Rp 54.020.000	Rp 50.259.480	93
6	Tunjangan PPH Pasal 21	Rp 13.503.250	Rp 12.430.642	92
7	Pembulatan Gaji	Rp 20.000	Rp 11.264	56
8	Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	Rp 1.059.256.250	Rp 813.450.000	77
9	Iuran JKK	Rp 3.377.000	Rp 2.072.084	61
10	Iuran JKM	Rp 10.133.000	Rp 6.216.286	61
11	Iuran jaminan kesehatan PNS	Rp 93.706.000	Rp 70.722.404	75
Jumlah		Rp 2.724.446.250	Rp 2.238.311.664	82

Tabel 3.4. Target, Realisasi dan Prosentase Pencapaian Belanja Langsung pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja	Anggaran		Realisasi	
				Sebelum perubahan	sesudah perubahan	Anggaran	%
2 4 2	Program pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	2,08	Rp 155.830.000	Rp 355.830.269	351.946.463	98
2 4 2 01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan provinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/kotada lam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan					
2 4 2 01 2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota					
2 4 2 02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	28	Rp 155.830.000	Rp 155.830.000	Rp 153.738.912	98

2	1	0	2.	1	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	1 Doku men	Rp 215.580.000	Rp 151.380.000	Rp 40.500.26 0	27
2	1	0			Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	80,7 4%				
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	16%				
2	1	0	2.		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi masyarakat) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	Rp 963.000.000			
2	1	0	2.	0	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	1 Doku men	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Rp 149.987.5 00	100

2	1	0	2.	0	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPk melalui rapat koordinasi kecamatan (Rajorcam), rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (Rajorcam), rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini lokakarya (Minilok)	25 Laporan	Rp 325.000.000	Rp 325.000.000	Rp 201.798.500	62
2	1	0	2.	0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di balaipenyuluhan KKBPk	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balaipenyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana)	20 Laporan	Rp 963.000.000	Rp 963.000.000	Rp 605.000.000	63
2	1	0	2.		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase masyarakat yang terpapar sipesan Program KKBPk (advokasi dan KIE)	25%	Rp 1.338.000.000			
2	1	0	2.	0	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	25 Unit	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 996.321.000	99
2	1	0	2.	0	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1470 Orang	Rp 1.296.000.000	Rp 1.296.000.000	Rp 1.296.000.000	100
2	1	0	2.		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	31,5 %	Rp 44.100.000	Rp 44.100.000	Rp 14.100.000	32

2	1	0	2.	0	PengendalianPendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana PenunjangPelayanan KB keFasilitas Kesehatan TermasukJaringan dan Jejaringnya	Jumlahlaporanpengendaliandistribusianalat dan obatkontrasepsi dan saranapenunjangpelayanan KB kefasilitaskesehatantermasukjaringan dan jejaringnya	12 Lapo ran	Rp 44.100.000	Rp 44.100.000	Rp 14.100.00 0	32
2	1	0	2.	0	PeningkatanKesertaanPenggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikutikesertaanpenggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	987 Oran g	Rp 419.945.000	Rp 238.879.355	Rp 238.879.3 55	57
2	1	0	2.	0	Penyediaansaranapenunjangpelayanan KB	Jumlah unit saranapenunjangpelayanan KB					
2	1	0	2.	0	PembinaanPelayananKeluargaBerencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasukjaringan dan jejaringnya	Jumlahlaporanhasilpembinaan pel.KB dan kespro di faskestermasukjaringan dan jejaringnya	3 Lapo ran	Rp 20.400.000	Rp 20.400.000	Rp 15.250.00 0	74
2	1	0	2.		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran sertaOrganisasiKemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalamPelaksanaanPelayanan dan PembinaanKesertaan Ber-KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memilikikelompokkerja KKBPK yang efektif					

2	1	0	2.	0	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mengikutipelaksanaan dan pengelolaan program BanggaKencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan KeluargaBerencana) di kampung KB					
2	1	0			Program pemberdayaan dan peningkatankeluargasejahtera	Persentasekelompokkegiatan yang melakukanpembinaankeluar gamelalui 8 fungsikeluarga					
2	1	0	2.		Pelaksanaan Pembangunan KeluargamelaluiPembinaanKetahanan dan KesejahteraanKeluarga	Persentasekelompokkegiatan dan usahapeningkatanpendapatan keluargasejahtera (UPPKS)	88%	Rp 2.221.000.000	Rp 2.061.000.000	Rp	
2	1	0	2.	0	Pengadaansaranakelompokkegiatanketahanan dan kesejahteraankeluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaanekonomikeluarga/UPPKS)	Jumlah unit saranakelompokkegiatanketahanan dan kesejahteraankeluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaanekonomikeluarga/UPPKS)	10 Unit	Rp 0	Rp 360.000.000	Rp 351.900.000	98
2	1	0	2.	0	Penyediaanbiayaoperasioanalbagipengelola dan pelaksanaan (kader) ketahanan dan kesejahteraankeluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan pemberdayaanekonomikeluarga/UPPKS)	Jumlahkaderpengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraankeluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaanekonomikeluarga/UPPKS)	810 Kader	Rp 2.221.000.000	Rp 1.701.000.000	Rp 1.170.880.000	69

2	1	0			Program penunjangurusanpemerintahandaerah	Nilai IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)	4				
2	1	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasepelaksanaankeuan gan yang ditetapkan/disahkan dan didistribusikan	100 %	Rp 2.011.744.481	Rp 2.037.976.088		
2	1	0	2.	0	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerimagaji dan tunjangan ASN	16 Orang	Rp 2.011.512.481	Rp 2.037.744.088	Rp 1.772.796.752	87
2	1	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentaselayananumumperan gkatdaerah yang terfasilitasi	98%	Rp 10.616.984	Rp 10.616.984		
2	1	0	2.	0	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 10.616.984	Rp 10.616.984	Rp 10.306.500	97
2	1	0	2.		Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	Persentaseingkatoperasionalis asiperkantorantahunan	98%	Rp 128.180.000	Rp 136.180.000		
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lapo ran	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000	Rp 5.800.000	89
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapo ran	Rp 15.680.000	Rp 15.680.000	Rp 11.904.904	76
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Lapo ran	Rp 106.000.000	Rp 114.000.000	Rp 114.000.000	100


2	1	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi	91%	Rp 17.768.000	Rp 17.768.000		
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 8.768.000	Rp 8.768.000	Rp 8.183.000	98
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 8.886.245	99

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2023, antara lain :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 50 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya aparatur yang dimiliki yang tentunya tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban diperoleh dari laporan kinerja masing-masing unit organisasi dalam lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis.
4. Dalam hal pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat terlihat bahwa tidak seluruhnya dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Beberapa pokok permasalahan yang menjadi kendala pencapaian kinerja sasaran strategis terutama disebabkan karena keterbatasan-keterbatasan baik pendanaan maupun sumber daya manusianya. Namun untuk tahun-tahun mendatang hal tersebut akan diupayakan untuk memperkecil kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja yang ingin dicapai, tentunya dengan mengacu kepada sasaran dan program prioritas.

Dengan demikian dalam penyusunan LKJIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dari pembangunan yang lebih efektif dan efisien.


KEPALA DINAS
SYULTJE M. PANAMBUNAN, SE, MAP
NIP. 19670715 198803 2 015

LAMPIRAN 1

RENCANA KERJA TAHUN 2023

Sasaran	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Pagu
	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	
Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Program pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	2,09	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan provinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan	1 Dokumen	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 200.000.269
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	28	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	1 Dokumen	Rp 155.830.000
Meningkatkan pembinaan keluarga berencana	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	81,14%	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	1 Dokumen	Rp 100.009.404

		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,75%				Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rajorcam), rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (Rajorcam), rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini lokakarya (Minilok)	25 Laporan	Rp 436.235.368
							Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana)	25 Laporan	Rp 809.999.533
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	37%	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	25 Unit	Rp 1.000.000.000
							Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1470 Orang	Rp 1.296.000.000

			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	31,5%	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	12 Laporan	Rp 30.150.000
						Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1212 Orang	Rp 359.238.000
						Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	3 Unit	Rp 90.000.000

							Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pel.KB dan kespro di faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	1 Laporan	Rp 23.400.000
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPB yang efektif	5	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPB di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) di kampung KB	45 Kampung KB	Rp 776.249.873
Meningkatkan pemberdayaan keluarga sejahtera	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80%	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	88%	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	10 Unit	Rp 401.900.000

							Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksanaan (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	810 Kader	Rp 1.518.680.000
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/disahkan dan didistribusikan	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 Orang	Rp 2.238.311.664
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	98%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 16.005.520
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat operasionalisasi perkantoran tahunan	98%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 4.990.000
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 11.904.904	

									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	5 Laporan	Rp 133.200.000
								91%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 7.202.800
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Rp 4.830.700

LAMPIRAN 2

Sasaran	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Anggaran	
	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Pagu	Realisasi

Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Program pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	2,09	2,02	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan provinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan	1 Dokumen	-	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 200.000.269	Rp 198.207.551
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	28	2,9	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 155.830.000	Rp 153.738.912

Meningkatkan pembinaan keluarga berencana	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	81,14 %	59,18%	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBP	6	5	Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 100.009.404	Rp 69.597.000
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,75 %	30,45%					Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBP melalui rapat koordinasi kecamatan (Rajorcam), rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (Rajorcam), rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini lokakarya (Minilok)	25 Laporan	25 Laporan	Rp 436.235.368	Rp 393.701.560

					Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana)	25 Laporan	25 Laporan	Rp 809.999.533	Rp 804.139.260				
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	37%	2,15%	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	25 Unit	25 Unit	Rp1.000.000.000	Rp 996.321.000
									Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1470 Orang	1470 Orang	Rp1.296.000.000	Rp1.296.000.000
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kot	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	31,5%	54,9%	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk	Jumlah laporan pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk	12 Laporan	12 Laporan	Rp 30.150.000	Rp 30.000.000

				Jaringan dan Jejaringnya	jaringan dan jejaringnya				
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1212 Orang	1113 Orang	Rp 359.238.000	Rp 276.322.000
				Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	3 Unit	3 Unit	Rp 90.000.000	Rp 88.911.000
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pel.KB dan kespro di faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	Rp 23.400.000	Rp 23.400.000

					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	5	5	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) di kampung KB	45 Kampung KB	45 Kampung KB	Rp 776.249.873	Rp 767.252.200
Meningkatkan pemberdayaan keluarga sejahtera	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80%	65%	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	88%	83%	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	10 Unit	10 Unit	Rp 401.900.000	Rp 349.781.360

									Penyediaan biaya operasioanal bagi pengelola dan pelaksanaan (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPK S)	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPK S)	810 Kader	810 Kader	Rp1.518.680.000	Rp1.395.090.000
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4	4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/disahkan dan didistribusikan	100%	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 Orang	16 Orang	Rp2.238.311.664	Rp2.238.311.664
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	98%	98%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Rp 16.005.520	Rp 16.005.520
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat operasionalisasi perkantoran tahunan	98%	98%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Rp 4.990.000	Rp 4.990.000
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 11.904.904	Rp 11.904.000

								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	Rp 133.200.000	Rp 133.200.000
						91%	90%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi				
								Penyediaan Jasa Perorangan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Rp 7.202.800	Rp 7.202.800
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	Rp 4.830.700	Rp 4.830.700